
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH PEMBANGUNAN JALAN TANI (Studi di Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende)

¹Risnonsius Moda, ²Richardus B. Toulawala

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula, Ende, Indonesia

Corresponding Email: richard1301leuwayan@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 20 Januari 2026; Disetujui: 21 Januari 2026; Diterbitkan: 25 Januari 2025

Abstraksi

Tulisan ini berjudul "Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Pembangunan Jalan Tani (Studi di Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende)". Strategi komunikasi adalah usaha untuk menyampaikan pesan atau informasi, baik secara verbal atau nonverbal kepada satu atau lebih penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi penerima pesan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah desa dalam penyelesaian masalah pembangunan jalan tani dengan tokoh adat dan masyarakat yang melakukan protes pada saat proses penggusuran jalan berlangsung. Untuk menganalisis masalah penelitian ini peneliti menggunakan teori komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Menurut Laswell, untuk mewujudkan komunikasi yang berhasil, perlu diperhatikan beberapa komponen yang termasuk dalam strategi komunikasi. Komponen-komponen tersebut antara lain siapa (who), pesan apa yang dinyatakan (says what), media apa yang digunakan (in which channel), siapa komunikannya (to whom), dan efek apa yang diharapkan (with what effect). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang membuat deskripsi atau pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah pembangunan jalan tani di Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang merupakan kepala desa dan perangkat desa serta tokoh adat dan masyarakat yang terlibat dalam konflik pembangunan jalan tani. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan jalan tani dapat diselesaikan dengan pendekatan komunikasi persuasif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat sebenarnya sangat mendukung pembangunan jalan tani untuk meningkatkan perekonomian desa yang lebih baik.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Jalan Tani, Desa Kurusare.

Abstraction

The study is entitled "Government Communication Strategies in Resolving Issues in Farm Road Development: A Study in Kurusare Village, Lepembusu Kelisoke District, Ende Regency." A communication strategy refers to the effort to convey messages or information, either verbally or non-verbally, to one or more recipients with the aim of influencing them. This research aims to examine the communication strategies employed by the village government in resolving issues surrounding the construction of a farm road, particularly with traditional leaders and community members who protested during the road-clearing process. The analysis is guided by Harold Lasswell's communication theory, which posits that effective communication requires attention to several components: who (the communicator), says what (the message), in which channel (the medium), to whom (the audience), and with what effect (the expected outcome). This research employs a qualitative descriptive method to provide a detailed account of situations and events related to the farm road construction in Kurusare Village. Primary data were obtained through direct interviews with key informants, including the village head, village officials, traditional leaders, and community members involved in the conflict. The findings reveal that the conflict over farm road construction was resolved through a persuasive communication

approach. The study concludes that both the village government and the community strongly support the farm road project as a means to improve the village's economic development.

Keywords: *Communication Strategy, Jalan Tani, Kurusare Village.*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa ialah kepala desa atau yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang desa, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat desa lewat berbagai macam pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan lain-lain (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2).

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi tata praja pemerintahan desa, penetapan peraturan desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi pendudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah (Sugiman, 2018: 86).

Sebagai ujung tombak pemerintahan pusat, pemerintah desa berbaur langsung dengan masyarakat dan diharapkan dapat berjalan secara efektif guna mewujudkan kemandirian daerah. Upaya mewujudkan kemandirian daerah mencerminkan peran partisipasi masyarakat dan pemerintahan dalam proses pembangunan yang dilandasi aturan kebijakan untuk partisipasi sesuai kompetensi yang dimiliki. Adapun tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam pembangunan diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah desa memiliki beberapa fungsi, yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya (Yuliana Ngongano, 2020: 4).

Fungsi pemerintahan desa misalnya tampak dalam pembangunan ekonomi desa seperti pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian yang merupakan salah satu unsur pembangunan ekonomi nasional diharapkan mampu menggerakkan perekonomian

masyarakat sampai ke pelosok pedesaan. Maka, pemerintahan desa perlu melakukan pembangunan fisik untuk menimbulkan percepatan pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi di kawasan pertanian (tanaman pangan hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan (wikipedia.org, 2020).

Pada tahun 2020 Kementerian Pertanian kembali membangun jalan usaha tani (JUT) padat karya di lahan pertanian seluas 14.000 hektar. Target itu naik lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Jalan akan dibangun di 10 provinsi dan 30 kabupaten. Tahun 2019 Kementerian Pertanian telah merealisasikan pembangunan jalan usaha tani untuk 4.320 hektar sawah sekitar 68,8 km. Infrastruktur tersebut dibangun di 16 kabupaten dalam 8 provinsi yang melibatkan 144 kelompok tani (Kementa. 2020). Dalam konteks penelitian, pemerintah Desa Kurusare telah melakukan pembangunan jalan tani sepanjang 1 km dan lebar 4 m sejak tanggal 20 Oktober 2019 dengan dana pembangunan sebesar Rp. 225.500,000 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Salah satu kendala yang pemerintah desa hadapi dalam pembangunan jalan tani ialah resistensi dari sebagian kelompok masyarakat dan tokoh adat yang protes saat proses penggusuran jalan berlangsung. Akibatnya, proses penggusuran jalan dihentikan selama beberapa minggu. Menanggapi hal tersebut, kepala desa segera melakukan rapat dengan seluruh perangkat desa guna mendiskusikan permasalahan penggusuran jalan tani. Selesai rapat kepala desa kemudian mengutus salah satu perangkat desa yang masih merupakan kerabat tokoh adat untuk menjalin komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasilnya, tokoh adat dan masyarakat mau menerima tawaran dari pemerintah desa, tetapi dengan syarat pemerintah desa dikenakan sanksi berupa denda uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan babi satu ekor sesuai dengan hukum adat yang berlaku untuk keperluan ritus adat pembebasan lahan oleh kepala adat (mosalaki). Pemerintah desa kemudian menyanggupi syarat yang telah ditentukan oleh tokoh adat. Pemerintah desa lalu menyiapkan uang sesuai nominal yang telah disepakati dan seekor babi untuk keperluan ritus adat pembebasan lahan. Setelah ritus adat tersebut dijalankan, konflik mereda dan sekarang masyarakat desa bisa menikmati jalan tani.

Kasus di atas adalah contoh yang baik tentang manajemen konflik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sudah seharusnya seorang kepala desa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam pembangunan. Dalam konteks ini, secara khusus kepala desa memiliki peran penting untuk membangun komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat dalam pembangunan jalan tani di Desa Kuru Sare. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diberi judul "Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Pembangunan Jalan Tani; Studi di Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende."

LANDASAN TEORI

Menurut Laswell, sebuah komunikasi dapat membawa kesuksesan bila dalam komunikasi tersebut diperhatikan beberapa komponen yang merupakan strategi komunikasi. Komponen-komponen tersebut antara lain siapa (*who*), pesan apa yang dinyatakan (*says*

what), media apa yang digunakan (*in which channel*), siapa komunikannya (*to whom*), dan efek apa yang diharapkan (*with what effect*). Berikut ini merupakan penjelasan tentang komponen-komponen tersebut (Onong Uchana Effendy, 2005: 10).

1. *Who* (Siapakah Komunikator). Sejumlah indikator yang berhubungan dengan komponen strategi komunikasi ini mencakup kepercayaan diri, kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, keinginan keras, penuh perhitungan logis dan rasional, dan mawas diri. Dalam menentukan komunikator, Laswell menganjurkan agar seorang komunikator setidaknya memiliki kriteria-kriteria seperti yang telah disebutkan di atas.
2. *Says What* (Pesan Apa yang Dinyatakan). Pesan merupakan isi dari komunikasi yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Pesan yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator setidaknya mesti memiliki beberapa kriteria seperti benar, autentik, rasional, terukur, banyak, valid, reliable, cepat, jelas sumbernya, dan selalu menjadi sumber pemerikaya pesan lainnya.
3. *In which Channel* (Media apa yang Digunakan). Agar penyampaian pesan berhasil, dibutuhkan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan komunikan. Sejumlah indikator yang berhubungan dengan komponen strategi komunikasi ini mencakup media elektronik, cetak, grafis gambar, infografis, visual diam, visual gerak, audio, dan audiovisual.
4. *To Whom* (Siapa Komunikannya). Sejumlah indikator yang berhubungan dengan komponen strategi komunikasi ini mencakup personal, kelompok terbatas, masyarakat luas, lawan tujuan, pertemanan dalam satu tujuan, anggota baru, bukan anggota organisasi, anggota lama, dan orang yang membutuhkan laporan.
5. *With What Effect* (Efek Apa yang Diharapkan). Sejumlah indikator yang berhubungan dengan komponen strategi komunikasi ini mencakup pemahaman pesan oleh komunikan, kerja sama dalam memahami pesan, keterjalinan pemahaman bersama, terjadinya perbedaan persepsi, ingin menunjukkan arah dari pesan, memberikan pesan yang dimaksud, bertambahnya persepsi baru yang sesuai, bertambahnya persepsi baru yang bertentangan, saling memperkaya pemahaman pesan, berorientasi pada pencapaian tujuan bersama dengan pesan yang sama, berorientasi pada capaian tujuan yang sama dengan pesan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suryabrata (2013: 76), penelitian deskriptif adalah penelitian yang membuat deskripsi atau pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti sesungguhnya berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan strategi komunikasi pemerintah dalam penyelesaian masalah pembangunan jalan tani di Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Komunikasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat

Di Desa Kurusare tengah berlangsung pembangunan jalan tani sepanjang 1 km dan lebar 4 m sejak tanggal 20 Oktober 2019 dengan dana pembangunan sebesar Rp 225.500.000 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sayangnya pemerintah desa menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian masyarakat dan tokoh adat. Mereka melakukan protes saat proses penggusuran jalan tengah berlangsung. Akibatnya, proses penggusuran jalan mandek beberapa minggu. Kepala desa kemudian bergerak cepat mencari opsi solutif dengan melakukan rapat bersama seluruh perangkat desa. Hasil rapat kemudian akan disampaikan kepada tokoh adat. Hasilnya, sebelum memberikan dukungan secara terbuka terhadap program pembangunan jalan tani tersebut, tokoh adat memberikan sebuah catatan penting. Pembangunan hanya boleh dilanjutkan setelah ritus adat pembebasan lahan oleh ketua adat (mosalaki) dilakukan dengan syarat pemerintah desa mesti membayar denda uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seekor babi untuk keperluan ritus tersebut.

Faktor Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah bersama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasa atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Setiap ada pembangunan yang bersentuhan dengan tanah atau wilayah, khususnya pembangunan jalan tani, pemerintah harus menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan mosalaki selaku tuan tanah. Biasanya akan diadakan ritus adat pembebasan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan. Peneliti menemukan bahwa pemerintah Desa Kurusare telah menginformasikan penggusuran jalan tani dari Kampung Mokeobo sampai Kampung Leke sekitar 1 km dalam Musrebang. Namun, informasi tersebut tidak menyebar luas karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrebang.

Pengaruh Komunikasi

Pengaruh komunikasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan dalam komunikasi. Kegiatan komunikasi yang baik menghasilkan respons timbal balik sehingga komunikasi dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam komunikasi tersebut. Konflik pembangunan jalan tani lebih disebabkan oleh ketidaksepahaman antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat. Ketika komunikasi yang lebih intens terjalin, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pembangunan jalan tani. Pemerintah juga akhirnya memperoleh pemahaman soal pembangunan yang lebih menghargai nilai-nilai antropologis masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pemerintah desa harus benar-benar mampu memahami tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat dan melibatkan orang-orang penting di kalangan masyarakat seperti ketua adat (mosalaki) dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah desa mesti memperhatikan posisi sosial seorang mosalaki di Desa Kurusare yang dalam sistem adat berhak atas tanah ulayat. Komunikasi dapat mempengaruhi seseorang jika dilakukan dengan tepat. Dalam penelitian tampak bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat mampu menghasilkan konsensus yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Masyarakat yang sebelumnya tampak resisten kemudian bisa memahami pentingnya pembangunan jalan tani bagi kemajuan

desa dari segi ekonomi. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam konflik jalan tani di Desa Kurusare ialah masalah komunikasi. Dengan demikian, pemerintah Desa Kurusare perlu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan publik lewat berbagai macam saluran dan menjalin komunikasi dengan masyarakat mengingat posisi sosialnya dan masyarakat yang terdampak soal pembebasan lahan agar tidak terjadi konflik. Pemerintah juga diharapkan mampu menyelesaikan sampai tuntas pembangunan jalan tani sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Masyarakat Desa Kurusare perlu mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah demi meningkatkan perekonomian desa untuk menyejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana 2005. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Riswandi. 2009. Ilmu Komunikasi. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2018. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprayoga, Imam dan Tabrobi. 2001. Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Fandy. 2008. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budio, Sesra. "Strategi Manajemen Sekolah." Jurnal Menata. 2:2, Tahun 2019.
- Rachmawati, Ike. "Strategi Komunikator dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelanggan Air Minum PDAM Kota Sukabumi." Jurnal Ilmu Administrasi, 10:1, Tahun 2019.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." Jurnal Bina Mulia Hukum. 7:1 Tahun 2018.
- Ngongano, Yuliana, dkk. 2020. "Peran Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan" Makalah, Halmahera Utara: Universitas Halmahera-Tobelo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
-

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Wikipedia. (n.d.). “Jalan usaha tani”. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses pada 12 Januari 2022, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_usaha_tani

Badrudin, Syamsiah. 2015. “Pengertian Pembangunan” dari <https://bappeda.bulelengkab.go.id>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

Kementa. 2020. “Tahun 2020 Kementerian Targetkan Pembangunan Jalan Usaha Tani Naik Tiga Kali Lipat” dari <https://www.kompas.com> diakses pada 12 Januari 2022.

Mulacela, Husen. 2022. “Definisi, Unsur dan Tujuan Komunikasi” dari <https://katadata.co.id>, diakses pada 12 Januari 2022.